

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, permasalahan moral dari hari ke hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai kasus moral terus menghiasi berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin membudaya, pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia), pelecehan seksual, pornografi, pelacuran, dan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang terkesan biasa di mata masyarakat kita sekarang, bukan sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan lagi (Marzuki, 2011: 1).

Khusus berkaitan dengan penyimpangan moral, terutama berkaitan dengan kasus korupsi, banyak dilakukan oleh para politikus. Temuan ICW (Indonesia Corruption Watch) melansir bahwa selama tahun 2012 sebanyak 52 kader parpol, 21 anggota dan mantan anggota DPR/D, 21 mantan dan kepala daerah menjabat, serta 2 pengurus partai, serta terakhir 1 menteri aktif terjerat kasus korupsi. Diantara kader parpol yang paling banyak terjerat kasus tersebut adalah kader dari partai Golkar sebanyak 14 orang kader. Secara keseluruhan, kasus yang menjerat anggota DPR/D merupakan kasus mafia anggaran dan bantuan sosial, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak tampak ke permukaan ([www.beranijujur.net.id](http://www.beranijujur.net.id)).

Selain kasus di atas, masih ada pelanggaran moral lain yang dilakukan oleh para wakil rakyat misalnya, mangkir saat sidang, tidur saat Paripurna, dan tidak ikut

rapat pleno ([www.okezone.com](http://www.okezone.com)). Perbuatan mereka itu dikategorikan pelanggaran moral karena perbuatan tersebut menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak amanah, padahal mereka telah dipilih oleh rakyat.

Fenomena yang berkaitan dengan penyimpangan moral seperti yang telah dikemukakan di atas tidak mengejutkan jika dilakukan oleh kader-kader partai yang berbasis Nasional, namun menjadi masalah serius yang sangat krusial jika dilakukan oleh kader partai yang berbasis agama. Parpol yang lahir dengan landasan nilai-nilai agama tentu diharapkan pemilihnya bisa menjadi garda depan dalam menjaga etika dan moralitas politik bangsa. Namun ternyata banyak kasus penyimpangan moral melanda politikus dari parpol berbasis agama, sebut saja berbagai kasus korupsi, sikap tak peduli suara publik, tak disiplin, ngotot soal gedung baru, hingga menonton video porno saat sidang. (Wahyu & Yohan, 2011)

Salah satu isu menarik terkait dengan partai politik yang berbasis agama dan perilaku kadernya bertentangan dengan nilai moral dan agama adalah kasus yang membelit kader partai PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang pada awal tahun 2013 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bagi banyak kalangan cukup mengejutkan, pasalnya baru kali ini kader PKS tersandung kasus korupsi, dan yang ditangkap bukan orang sembarangan, yaitu Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS). Dengan kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaq, ini berdampak besar bagi PKS. Para petinggi PKS memilih tak mengomentari perkara Luthfi, khususnya perihal tuntutan 18 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelum kasus ini (suap impor daging sapi) mencuat ke publik, juga ramai diekspos media tentang perilaku salah satu kader partai PKS yang dianggap menyimpang dari nilai moral, yaitu Arifinto, (anggota DPR RI dari fraksi PKS) yang tersorot kamera wartawan sedang melihat video porno saat rapat paripurna DPR RI. Kader yang bersangkutan pun mengaku dan mundur dari keanggotaannya di DPR RI (Arifin & Nurul, 2012). Selain itu muncul pula tuduhan dari kader senior PKS, Yusuf Supendi, tentang isu korupsi dan penyelewengan lain di internal PKS. Meskipun tuduhan tersebut belum terbukti, namun setidaknya ini mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan yang terjadi di internal partai ini berkaitan dengan moral (Widjaya & Ismoko, 2011).

Moral menurut Rogers (dalam Ali & Asrori, 2008: 136) adalah kaidah dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat dan merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial. Mengacu kepada konsep moral yang dikemukakan Rogers di atas dan dikaitkan dengan berbagai kasus yang telah dikemukakan di atas, maka kita bisa memandang bahwa perilaku korupsi, mangkir saat sidang, tidur saat Paripurna, tidak ikut rapat pleno dan penyalahgunaan anggaran dana pemerintah, hal itu tidak sesuai dengan pendapat Rogers. Oleh karena itu, sepertinya tak berlebihan jika disebutkan bahwa sebagian politikus saat ini tengah mengalami kemerosotan nilai moral.

Untuk memahami dan menyikapi berbagai persoalan moral yang sering terjadi belakangan ini, maka diperlukan adanya kecerdasan moral, yaitu kapasitas mental

untuk menentukan bagaimana prinsip universal manusia bisa diterapkan dalam nilai-nilai, tujuan dan perbuatan seseorang. Lennick dan Kiel merangkum kecerdasan moral dalam 4 aspek/ prinsip universal yaitu: *Integrity, responsibility, compassion dan forgiveness*. Aspek-aspek utama tersebut yang akan melindungi seseorang agar tetap berada di jalan yang benar dan mendorong untuk berperilaku moral (Lennick & Kiel, 2005 : 7).

Kemerosotan nilai moral terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yang pertama ialah sejumlah kondisi faktor sosial kritis yang membentuk karakter moral secara perlahan mulai runtuh, yaitu : pengawasan, teladan perilaku bermoral, pendidikan spiritual dan agama, norma-norma nasional yang jelas, dukungan masyarakat, stabilitas serta pola asuh yang benar. Kedua, secara terus menerus menerima masukan dari luar yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. (Borba, 2008: 5).

Salah satu penyebab kemerosotan moral seperti telah dikemukakan Borba adalah mulai runtuhnya nilai-nilai agama. Agama atau yang dalam istilah lain disebut religi diartikan sebagai peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Sedangkan religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Larasati, 2011: 18-19) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).

Agama dan moral jika dihubungkan satu dan lainnya tampak saling berkaitan erat, tetapi harus diingat bahwa konsep tentang agama, tidak otomatis sama dengan bermoral. Banyak orang yang mengerti tentang agama, akan tetapi moralnya merosot dan tidak sedikit pula orang yang tidak paham agama, akan tetapi moralnya cukup baik (Daradjat, 2003: 98). Hal ini terlihat pada realitas perilaku politikus yang jauh dari nilai agama, padahal partainya berazaskan agama. Dengan partai yang berazaskan agama, maka secara ideal seharusnya para politikus yang bernaung di bawah partai tersebut tentu memiliki tingkat religiusitas yang lebih baik dibanding dengan para politikus yang partainya tidak berazaskan agama Islam. Di dalam partai yang berbasis agama selalu tampak simbol-simbol agama, sebut saja salah satunya partai PKS: simbol agama yang tampak, seperti tampilan busana pada kader-kader perempuan yang lebih mengacu pada syariat Islam, dan tampilan laki-laki yang cenderung mengikuti sunnah rasul, seperti memelihara jenggot, menggunakan pakaian cenderung berwarna putih, memakai peci dan ramah dalam berbicara.

Para kader tersebut adalah contoh pemimpin bagi setiap anggota partai yang diusungnya, dan seorang kader juga mempunyai peranan penting di tengah masyarakat dan negara. Ia harus mampu membina sekaligus menjadi pelindung bagi umat, hal yang paling mendasar adalah seorang pemimpin harus taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Ada beberapa kriteria pemimpin yang akan muncul di tengah masyarakat, 1) seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dan melindungi rakyat karena Allah swt wajib dipatuhi kaum muslim, 2) seorang pemimpin yang tak punya rasa malu, melarang kaum muslim menjalankan syiar agama, serta suka bercanda dan

hidup bermegah-megahan, tidak layak ditaati dan didengar, 3) seorang pemimpin yang bermaksud merusak dan menyingkirkan agama (islam), memimpin dengan selain syariat Allah swt atau menafsirkan syariat-Nya menurut keinginan hawa nafsu harus dijauhi dan dicopot dari kedudukannya (Yusuf Sayyid & Durrah Ahmad, 2007).

Dengan demikian dapat dikatakan sebuah pemerintahan tak ubahnya ialah sebuah amanah dan tanggung jawab dan sarana mencapai tujuan ilahi, bukan wahana untuk menimbun harta atau menindas rakyat kecil, seseorang pemimpin dalam kaca mata islam adalah sosok yang punya hak dan kewajiban yang sama dengan muslim lainnya. Salah satu cara pelaksanaan yang harus dipahami adalah membenahan dan perbaikan dalam bidang politik dan hukum, kebijakan islam dalam membenahi dan memperbaiki bidang kehidupan ini sangat efektif dan memadai untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan bila para pelaku yang melaksanakannya terdiri dari orang yang jujur dan pemimpin yang tulus (Yusuf Sayyid & Durrah Ahmad, 2007).

Berdasarkan paparan fenomena di atas, muncul pertanyaan dibenak peneliti, "Apakah keberagamaan (religiusitas) pada kader PKS berhubungan dengan kecerdasan moral". Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang **"Hubungan Antara Religiusitas dengan Kecerdasan Moral pada Kader Partai Keadilan Sejahtera di Pekanbaru"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu “ Apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan kecerdasan moral pada kader partai PKS di Pekanbaru? ”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat religiusitas yang dimiliki kader partai PKS di Pekanbaru dengan kecerdasan moralnya.

## **D. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa penelitian tentang hubungan religiusitas dengan kecerdasan moral sebelumnya, seperti penelitian Retno Larasati Nigrum yang mengangkat judul “Religiusitas dan kaitannya dengan Kecerdasan Moral pada Remaja Madya”, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena peneliti sebelumnya menggunakan subjek pada masa remaja Madya, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek pada masa Dewasa. Selain itu teori yang digunakan peneliti sebelumnya juga berbeda dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan teori dari Borba, sedangkan peneliti menggunakan teori dari Lennick dan Kiel.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Menambah khasanah pengetahuan psikologi pada umumnya dan psikologi agama khususnya. Selain itu hasil penelitian ini nantinya mudah-mudahan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang religiusitas atau kecerdasan moral dengan prediktor lain.

#### 2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan bagi pengurus Dewan Perwakilan Daerah PKS Pekanbaru, untuk mengembangkan religiusitas dalam proses pembinaan kader agar lebih baik lagi ke depannya. Adapun bagi kader PKS Pekanbaru secara keseluruhan, diharapkan menjadi bahan evaluasi terkait dengan deskripsi tingkat religiusitas dan hubungannya dengan kecerdasan moral.